

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan konsep dan hubungan antara kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai tujuan pembangunan nasional. Kebahagiaan diukur melalui Indeks Kebahagiaan. Selama lima tahun terakhir (2020–2024), peringkat Indeks Kebahagiaan Indonesia di dunia stagnan, berada di posisi keenam di ASEAN, dan belum pernah mencapai peringkat 70 dunia seperti lima negara ASEAN lainnya. Secara nasional, survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks Kebahagiaan Indonesia mengalami tren peningkatan, tetapi dengan laju pertumbuhan yang melambat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Demokrasi Indonesia terhadap Indeks Kebahagiaan masyarakat Indonesia serta menganalisis variabel yang paling berpengaruh terhadap Indeks Kebahagiaan masyarakat Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa data panel dari tahun 2017 dan 2021. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Demokrasi Indonesia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kebahagiaan masyarakat Indonesia. Secara parsial Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Kebahagiaan masyarakat Indonesia, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Demokrasi Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kebahagiaan masyarakat Indonesia. Variabel yang paling berpengaruh terhadap Indeks Kebahagiaan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Implikasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah mengoptimalkan peran dewan pengupahan di tingkat provinsi untuk merekomendasikan besaran UMP yang adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi setempat. Penetapan UMP dilakukan sesuai formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah yang terdiri atas UMP tahun sebelumnya dan nilai penyesuaian UMP (UMP yang disesuaikan dengan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu). Perbedaan UMP antar provinsi selain disebabkan UMP tahun sebelumnya adalah karena perbedaan nilai pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Oleh sebab itu, untuk menaikkan UMP perlu meningkatkan dua elemen tersebut.

Kata kunci: Indeks Kebahagiaan, Upah Minimum Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Demokrasi Indonesia

SUMMARY

This study is motivated by the differences in concepts and relationships between welfare and happiness as national development goals. Happiness is measured through the Happiness Index. Over the past five years (2020–2024), Indonesia's global Happiness Index ranking has stagnated, consistently ranking sixth in ASEAN and failing to reach the top 70 globally, unlike five other ASEAN countries. Nationally, surveys conducted by Statistics Indonesia (BPS) indicate that Indonesia's Happiness Index has shown an upward trend, albeit with a slowing growth rate.

The purpose of this study is to analyze the influence of the Provincial Minimum Wage, Human Development Index, and Indonesian Democracy Index on the Happiness Index of Indonesian society and to identify the most influential variable. This research adopts a quantitative approach using secondary data in the form of panel data from 2017 and 2021. The analytical method applied is panel data regression analysis using the Random Effect Model (REM) approach.

The findings reveal that the Provincial Minimum Wage, Human Development Index, and Indonesian Democracy Index collectively have a significant influence on the Happiness Index of Indonesian society. Partially, the Provincial Minimum Wage has a positive and significant effect on the Happiness Index, whereas the Human Development Index and Indonesian Democracy Index have no significant impact. Among these variables, the Provincial Minimum Wage (UMP) is the most influential on the Happiness Index.

The implications of this study suggest optimizing the role of wage boards at the provincial level to recommend fair Provincial Minimum Wage amounts that align with local economic conditions. The determination of the Provincial Minimum Wage is conducted based on a government-mandated formula, consisting of the previous year's Provincial Minimum Wage and an adjustment value (calculated by considering economic growth, inflation, and specific indices). Differences in the Provincial Minimum Wage across provinces are attributed not only to the previous year's wage but also to variations in economic growth and specific indices. Therefore, efforts to increase the Provincial Minimum Wage should focus on enhancing these two elements.

Keywords: Happiness Index, Provincial Minimum Wage, Human Development Index, Indonesian Democracy Index